

FILSAFAT KEBUDAYAAN



**OLEH
IDA BAGUS GDE PUJAASTAWA**

**PROGRAM STUDI ANTROPOLOGI
FAKULTAS SASTRA DAN BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
2015**

DAFTAR ISI

1. Filsafat Kebudayaan dan Ilmu Kebudayaan
 2. Konsep Kebudayaan
 3. Wujud Kebudayaan
 - 3.1 Sistem Nilai
 - 3.2 Sistem Gagasan
 - 3.3 Sistem Tindakan
 - 3.4 Sistem Material
 4. Unsur Kebudayaan.
 5. Kerangka Kebudayaan
 6. Kebudayaan Diperoleh Melalui Proses Belajar
 7. Kebudayaan Milik Masyarakat
 8. Fungsi Kebudayaan
 9. Dinamika Kebudayaan
- Daftar Pustaka

FILSAFAT KEBUDAYAAN

1. Filsafat Kebudayaan dan Ilmu Kebudayaan

Langkah awal yang terpenting dalam upaya memahami filsafat kebudayaan adalah kemampuan untuk menentukan batas pengertian yang tegas antara filsafat kebudayaan dan ilmu kebudayaan. Filsafat kebudayaan pada dasarnya berusaha untuk memahami hakikat kebudayaan sebagai realitas kemanusiaan secara mendalam dan menyeluruh. Filsafat kebudayaan memiliki tanggung jawab moral menuntun dan mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip tertentu agar tujuan kebudayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dapat tercapai. Sedangkan ilmu kebudayaan, seperti ilmu antropologi budaya, misalnya, merupakan bidang ilmu yang bertujuan untuk mempelajari, melukiskan, dan menguraikan kebudayaan secara khusus. Sesungguhnya ilmu ini termasuk ilmu pengetahuan yang bersifat ideografis yang dapat melukiskan, membuat analisis dan sintesis, tetapi tidak berwenang untuk menetapkan kaidah, norma dan pedoman. Ilmu-ilmu kebudayaan mengumpulkan fakta dan cara pelaksanaannya, mengambil darinya keseragaman dan perbedaan, menetapkan hukum empiris, dan secara induktif menyusun definisi tersebut pada taraf metafisika menurut norma-norma transenden. Tegasnya, ilmu kebudayaan mempelajari peristiwa dan bentuk-bentuk kebudayaan yang terdapat dalam kesatuan-kesatuan sosial yang berbeda-beda menurut dimensi ruang dan waktu, sedangkan filsafat kebudayaan mendekati hakikat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia yang untuk sebagian mengatasi ruang dan waktu empiris, dimensi sejarah dan setempat (Bakker, 1984 : 11-13).

2. Konsep Kebudayaan

Masalah paling mendasar yang kerap menghadang setiap upaya pemahaman kebudayaan adalah tiadanya kata sepakat di kalangan para pakar mengenai konsep kebudayaan. Hingga kini perdebatan mengenai konsep kebudayaan tiada kunjung berakhir dan batasan pengertian tentang kebudayaan pun menjadi kian bervariasi.

Istilah kebudayaan atau *culture* dalam bahasa Inggris, berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin *colere* yang berarti bercocok tanam (*cultivation*). Di kalangan pemeluk agama Kristen istilah *cultura* juga dapat diartikan sebagai ibadah atau pemujaan (*worship*). Di Indonesia sendiri hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan mengenai asal-muasal istilah kebudayaan. Salah satu pendapat menyatakan bahwa dalam bahasa Indonesia kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta *buddhayah*, yaitu bentuk jamak dari kata *buddhi* yang berarti akal. Ada kalanya pula ditafsirkan bahwa kata budaya merupakan perkembangan dari kata majemuk “budi – daya” yang terdiri dari cipta, rasa, dan karsa (Poerwanto, 2000 : 51-52). Sementara itu pendapat lain menyatakan bahwa ada kemungkinan kata kebudayaan berasal dari kata *abhudaya* dari bahasa Sansekerta. Perubahan bentuk kata *abhudaya* menjadi budaya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum-hukum filologi *aphaeresis* dan *syncope* (Bakker, 1984 : 32). Perdebatan paling mutakhir mengenai kata kebudayaan di kalangan pakar ilmu antropologi di Indonesia terjadi tahun 1999. Ketika itu, Amri Marzali, Parsudi Suparlan, Heddy Shri Ahimsa, dan Bachtiar Alam terlibat perdebatan sengit dalam penggunaan kata budaya dan kebudayaan sebagai kata benda atau kata sifat (Wacana Antropologi, 1999, Vol.2, No.4).

Konsep kebudayaan untuk pertama kalinya dikembangkan oleh para pakar antropologi menjelang akhir abad ke sembilan belas. Definisi pertama yang sungguh-sungguh jelas dan komprehensif diajukan oleh ahli antropologi Inggris, Sir Edward Burnett Tylor. Tepatnya tahun 1871, Tylor telah mengajukan definisi kebudayaan

sebagai kompleks keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat-istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Sejak itu, sejalan dengan kian berkembangnya pengetahuan mengenai kebudayaan, muncul ratusan pembatasan konsep kebudayaan dari berbagai perspektif bidang keilmuan. Sampai dengan tahun 1952, A.L. Kroeber dan C. Kluckhohn dalam bukunya "*Culture : A Critical Review of Concepts and Definitions*" telah berhasil mengidentifikasi dan menginventarisasi 179 batasan konsep kebudayaan dalam upayanya merumuskan kembali konsep kebudayaan secara lebih sistematis. Dalam buku tersebut antara lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kebudayaan adalah keseluruhan pola-pola tingkah laku dan tingkah laku berpola yang diperoleh dan diturunkan melalui simbol, yang akhirnya mampu membentuk sesuatu yang khas dari kelompok-kelompok manusia, termasuk perwujudannya dalam benda-benda material.

3. Wujud Kebudayaan

J.J. Honigman (1954) membedakan fenomena kebudayaan atau wujud kebudayaan, yang terdiri dari (1) sistem budaya yang mencakup sistem nilai, gagasan, dan norma, (2) sistem sosial yang terdiri dari kompleks aktivitas dan tindakan berpola, dan (3) artefak atau kebudayaan fisik (Poerwanto, 2000 : 53).

Koentjaraningrat, pakar antropologi Indonesia dalam sejumlah bukunya tampak mengikuti pikiran Honigman mengenai tiga wujud kebudayaan di atas. Namun belakangan ia memosisikan sistem gagasan atau ide sebagai wujud kebudayaan yang berdiri sendiri yang terpisah dari sistem budaya (Koentjaraningrat, 1982; 1996). Dengan demikian, fenomena kebudayaan terdiri dari empat wujud, yaitu sistem nilai, gagasan, tindakan, dan hasil karya. Keempat

wujud kebudayaan tersebut dapat dipaparkan secara lebih rinci sebagai berikut :

3.1 Sistem Nilai

Nilai merupakan konsep-konsep mengenai segala sesuatu yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan masyarakat yang berfungsi sebagai pedoman orientasi bagi pikiran, tindakan, dan ciptaan manusia.

Batasan pengertian mengenai nilai seperti dipaparkan di atas memang terkesan bersifat sangat abstrak. Oleh karenanya, untuk memudahkan pemahaman pengertian tentang nilai, maka nilai kerap dipadankan sebagai pandangan hidup. Hal tersebut bisa diterima karena sistem nilai budaya seringkali dijadikan sebagai pandangan hidup yang dianut oleh individu maupun kelompok (masyarakat). Namun demikian, pengertian kedua istilah tersebut sebaiknya tidak disamakan. Pandangan hidup biasanya mengandung sebagian dari nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat yang dipilih secara selektif oleh individu-individu atau golongan-golongan dalam masyarakat. Dengan demikian, nilai merupakan pedoman hidup yang dianut oleh masyarakat, sedangkan pandangan hidup merupakan suatu pedoman yang dianut oleh golongan-golongan atau bahkan individu-individu tertentu dalam masyarakat. Karena itu, sistem nilai sudah pasti berlaku bagi seluruh warga masyarakat, sedangkan pandangan hidup hanya berlaku bagi individu-individu atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.

Disamping sistem nilai budaya dan pandangan hidup, konsep ideologi juga merupakan suatu sistem pedoman hidup, namun memiliki sifat yang lebih khusus daripada sistem nilai budaya. Ideologi dapat dianut oleh seluruh warga masyarakat, atau golongan tertentu dalam masyarakat, tetapi tidak oleh individu.

3.2 Sistem Gagasan

Kebudayaan dalam wujud sistem gagasan terdiri dari kompleks ide atau pikiran (baik yang diciptakan secara individual maupun kolektif) yang difahami dan dijadikan acuan atau pedoman bagi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Manusia mampu melahirkan berbagai gagasan sebagai konsekwensi logis dari hakikat manusia sebagai makhluk berpikir. Gagasan-gagasan yang diakui dan diterima oleh masyarakat cenderung dibakukan dan dijadikan milik bersama dari masyarakat yang bersangkutan. Apabila gagasan-gagasan yang telah dibakukan tersebut diimplementasikan dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, maka ia akan menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Norma, aturan, hukum, dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang kita kenal dalam kehidupan sekarang pada dasarnya berawal dari gagasan-gagasan masa lalu yang telah disepakati bersama.

3.3 Sistem Tindakan

Sistem tindakan atau perilaku terdiri dari berbagai tindakan atau tingkah laku manusia yang mengacu atau berpedoman atau ditata oleh sistem nilai dan sistem gagasan yang berlaku dalam masyarakat. Setiap tindakan atau aktivitas manusia yang berpedoman pada sistem nilai dan gagasan tersebut merupakan tindakan berpola atau *action*. Tindakan berpola dibedakan dengan tindakan naluriah, yakni tindakan yang semata-mata dimotivasi oleh naluri atau insting. Tanpa mengacu kepada sistem nilai dan gagasan tertentu. Sebagai makhluk berbudaya, sebagian besar dari tindakan manusia tergolong tindakan berpola. Hanya sebagian kecil saja dari tindakan manusia yang bukan tergolong tindakan berpola (seperti gerak refleks dan gerakan naluriah lainnya). Tindakan manusia yang bersifat naluriah tersebut disebut *behavior*. Contoh tindakan berpola, misalnya dalam banyak kebudayaan dijumpai adanya perilaku memberi atau menerima sesuatu kepada atau dari orang lain dengan

menggunakan tangan kanan. Tindakan tersebut bukanlah tergolong tindakan naluriah atau tindakan sembarangan, melainkan tindakan berpola. Tindakan tersebut tersebut ditata atau dipedomani oleh seperangkat nilai, aturan, atau norma tertentu yang terpelihara pada masyarakat yang bersangkutan, yang menganggap kanan lebih sopan daripada kiri. Begitu pula dalam kebiasaan tidur orang Bali dengan kepala cenderung mengarah “kaja” atau “kangin”. Hal tersebut jelas merupakan tindakan berpola, karena dipedomani atau ditata oleh nilai budaya yang menganggap arah “kaja” dan “kangin” lebih berharga atau lebih sakral daripada “kelod” dan “kauh”.

3.4 Sistem Material

Kebudayaan dalam wujud sistem material atau kerap pula disebut *material culture* atau *phisical culture*, terdiri dari benda-benda yang bersifat artifisial yang tercipta dari karya manusia (*artifact*) melalui proses penciptaan yang mengacu pada sistem nilai, gagasan, dan tindakan tertentu. Kebudayaan material ini bersifat sangat kongkrit dan dapat dilihat dan diobservasi secara langsung. Contoh kebudayaan material : arsitektur, lukisan, patung, dan lain sebagainya.

Keempat wujud kebudayaan yang terurai di atas memiliki mekanisme hubungan yang bersifat vertikal seperti diagram berikut :

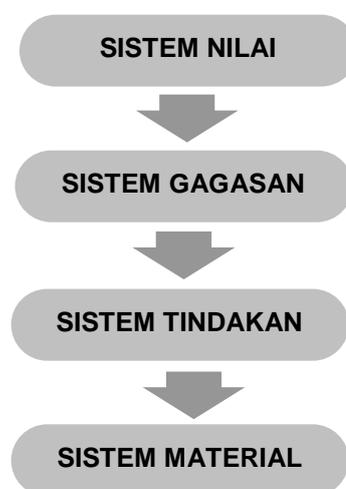


Diagram 1: Mekanisme Hubungan antarwujud Kebudayaan

Hubungan vertikal dari atas ke bawah merupakan hubungan yang bersifat mempengaruhi, di mana variabel yang lebih tinggi berkedudukan sebagai independen variabel yang mempengaruhi variabel-variabel di bawahnya. Dalam hal ini sistem nilai yang berkedudukan sebagai variabel tertinggi merupakan variabel utama yang mempengaruhi semua variabel yang ada di bawahnya (sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya). Dengan kata lain, hubungan vertikal dari atas ke bawah memosisikan sistem nilai sebagai pedoman atau acuan utama yang berfungsi untuk menata setiap sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Selanjutnya, sistem gagasan yang dipedomani oleh sistem nilai menjadi pedoman atau acuan yang berfungsi untuk menata sistem tindakan dan hasil karya, dan begitu seterusnya. Sebaliknya, hubungan vertikal dari bawah ke atas merupakan hubungan yang bersifat ketergantungan, di mana variabel yang di bawah tergantung pada atau dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lebih tinggi. Dalam hal ini misalnya, sistem material atau hasil karya tergantung pada atau dipengaruhi oleh sistem tindakan, gagasan, dan nilai. Selanjutnya, sistem tindakan tergantung pada atau dipengaruhi oleh sistem gagasan dan sistem nilai, dan begitu seterusnya.

4. Unsur Kebudayaan.

Unsur-unsur universal kebudayaan (*cultural universals*) merupakan isi pokok yang selalu dapat dijumpai dalam semua kebudayaan yang ada di berbagai belahan dunia, baik pada masyarakat yang masih bersifat sederhana maupun modern. Unsur-unsur universal kebudayaan yang dimaksud mencakup tujuh unsur kebudayaan, yaitu :

1. Bahasa
2. Sistem pengetahuan
3. Organisasi sosial dan kekerabatan

4. Sistem peralatan dan teknologi
5. Sistem mata pencaharian hidup
6. Kesenian
7. Sistem religi.

Dari uraian mengenai unsur-unsur universal kebudayaan di atas, maka pemahaman tentang kebudayaan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat estetika atau kesenian saja, melainkan mencakup berbagai aspek kehidupan manusia.

5. Kerangka Kebudayaan

Kombinasi antara wujud dan unsur kebudayaan melahirkan sebuah kerangka kebudayaan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek wujud dan unsur dari setiap fenomena kebudayaan. Kerangka kebudayaan dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai berikut :

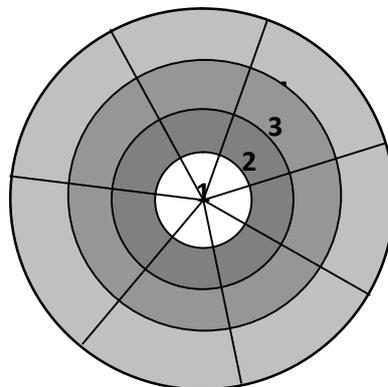


Diagram 2 : Kerangka Kebudayaan

Analisis dimensi I terdiri dari empat wujud kebudayaan (sistem nilai, gagasan, tindakan, dan material) yang digambarkan sebagai empat lingkaran konsentris. Dalam hal ini sistem nilai dilambangkan sebagai lingkaran nomor 1 yang merupakan lingkaran paling dalam atau inti; sistem gagasan dilambangkan sebagai lingkaran nomor 2; sistem tindakan dilambangkan sebagai lingkaran nomor 3; dan sistem material dilambangkan sebagai lingkaran nomor 4 yang merupakan lingkaran paling luar.

Analisis dimensi II terdiri dari tujuh unsur universal kebudayaan, digambarkan pada bagian lingkaran yang terbagi menjadi tujuh sektor, yang masing-masing melambangkan salah satu dari tujuh unsur universal kebudayaan. Dengan demikian, akan terlihat bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki empat wujud, yaitu sistem nilai, gagasan, tindakan, dan materi. Sebagai contoh, dalam bahasa, misalnya, terkandung : (1) sistem nilai, yakni nilai-nilai budaya masyarakat penuturnya; (2) sistem gagasan atau ide berupa kaidah-kaidah tata bahasa, norma-norma ujaran, dan aturan-aturan pemakaiannya; (3) sistem tindakan seperti tindakan seperti bercakap-cakap atau berkomunikasi antar penuturnya; dan (4) sistem material atau fisik, seperti peralatan komunikasi, buku-buku, lontar, kaset-kaset rekaman, disket dan sebagainya. Dalam sistem religi atau agama terkandung : (1) sistem nilai yang tercermin dalam filsafat agama; (2) sistem gagasan yang tercermin dalam etika agama; dan (3) sistem tindakan yang tercermin dalam upacara atau ritual keagamaan atau yang disebut pula dengan *religion in action*, dan (4) sistem material yang terdiri dari berbagai macam fasilitas keagamaan, seperti tempat ibadah, perlengkapan upacara, dan sebagainya (Koentjaraningrat, 1985 : 104-105)

6. Kebudayaan Diperoleh Melalui Proses Belajar

Keterbatasan kemampuan naluriah manusia cenderung diimbangi dengan kemampuan lain yang diperoleh melalui proses belajar. Kemampuan belajar ini dimungkinkan oleh berkembangnya tingkat intelegensi dan cara berpikir simbolik pada manusia.

Pewarisan kebudayaan tidak hanya secara vertikal atau kepada anak cucu mereka, tetapi juga horizontal di mana manusia yang satu dapat belajar kebudayaan dari manusia yang lain. Berbagai pengalaman manusia dalam rangka kebudayaannya akan diteruskan kepada generasi berikutnya atau dapat pula dikomunikasikan kepada individu lainnya karena ia dapat mengembangkan gagasan-

gagasannya dalam bentuk lambang-lambang vocal berupa bahasa, serta dikomunikasikan dengan orang lain melalui kepandaiannya berbicara dan menulis.

Kebudayaan merupakan pola tingkah laku yang dipelajari. Paling tidak ada tiga proses belajar kebudayaan yang penting :

- (1) Internalisasi, proses belajar kebudayaan dari lahir sampai mati dalam kaitannya dengan pengembangan perasaan, hasrat, emosi, dalam rangka pembentukan kepribadian.
- (2) Sosialisasi, berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk sosial, di mana setiap individu belajar pola-pola tindakan agar dapat mengembangkan hubungan dengan individu-individu lain di sekitarnya.
- (3) Enkulturasasi atau pembudayaan, merupakan proses belajar kebudayaan di mana seseorang harus mempelajari dan menyesuaikan sikap dan alam berpikirnya dengan sistem norma yang ada dalam masyarakatnya.

Kebudayaan tidaklah diwariskan secara genetis, melainkan diperoleh individu-individu melalui proses belajar baik di lingkungan keluarga, maupun masyarakatnya. Sejak kecil seseorang dididik atau diajar untuk mentaati nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan, adat-istiadat, atau cara-cara hidup yang berlaku dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya. Oleh karenanya amat sedikit tindakan manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang diperolehnya tanpa melalui proses belajar (tindakan naluriah dan refleksi). Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia yang kian maju, berbagai tindakan manusia yang bersifat naluriah seperti makan, minum, dan berjalan, juga ditata dan diberi aturan-aturan sehingga menjadi tindakan berbudaya. Dalam peradaban manusia modern berbagai tindakan naluriah diubah menjadi tindakan berpola dengan norma dan aturan yang sangat kompleks (Poerwanto, 2000 : 88-89; Haviland, 1988 : 338; Peursen, 1976 : 141-147).

7. Kebudayaan Milik Masyarakat

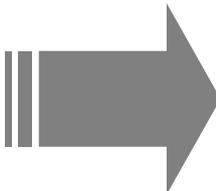
Kebudayaan bukanlah milik individu atau orang perorang, melainkan menjadi milik kolektif (masyarakat). Hal tersebut disebabkan oleh proses terbentuknya kebudayaan lebih banyak berasal dari komplementasi dari gagasan-gagasan individu yang selanjutnya menjadi gagasan kolektif. Meskipun pada mulanya boleh jadi unsur-unsur tertentu merupakan gagasan atau hasil karya individual, namun apabila unsur-unsur tersebut diterima dan diterapkan dalam kehidupan sebagian besar warga masyarakat, maka dengan sendirinya akan menjadi milik masyarakat sekaligus menjadi identitas bersama bagi masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat dan kebudayaan merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan, sebab tidak ada masyarakat tanpa kebudayaan dan tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat.

8. Fungsi Kebudayaan

Bronislaw Malinowski, seorang pakar Antropologi mengajukan sebuah orientasi teori yang dinamakan Fungsionalisme Kebudayaan, dengan anggapan dasar bahwa fungsi esensial dari kebudayaan pada awalnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar (*basic human needs*).

Kebutuhan Hidup Mendasar	Kebudayaan
Makanan Perlindungan Bekerjasama Berkomunikasi Ingin tahu Spiritual	Memproduksi & mengolah makanan Rumah, pakaian Organisasi Bahasa Ilmu Pengetahuan Religi



Pemenuhan kebutuhan hidup yang paling mendasar tersebut kerap tidak dapat dicapai dengan mudah sehingga melahirkan kebutuhan-kebutuhan lain yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan mendasar. Misalnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan makanan, manusia juga membutuhkan adanya kerjasama dengan sesamanya. Sehubungan dengan itu lahirlah berbagai bentuk kelompok atau organisasi, seperti kelompok berburu, organisasi *subak*, atau Perkumpulan Petani Pemakai Air, dan lain sebagainya.

Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu unsur atau sub unsur kebudayaan tidak hanya berfungsi untuk memenuhi suatu jenis kebutuhan saja, melainkan memenuhi kombinasi dari sejumlah kebutuhan atau keinginan manusia. Misalnya, makanan tidak hanya berfungsi untuk memuaskan rasa lapar semata, tetapi juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan prestise (gengsi), keindahan, solidaritas atau persahabatan. Seni penyajian makanan pada acara pesta-pesta misalnya, merupakan contoh mengenai makanan tidak saja berfungsi untuk memenuhi kebutuhan akan makanan semata, tetapi juga estetika, prestise, solidaritas dan sebagainya. Demikian pula fungsi olahraga tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan saja, tetapi juga berfungsi sebagai mata pencaharian (profesi), prestise, dan sebagai wahana solidaritas atau persahabatan.

Agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik, maka setiap unsur kebudayaan tidak pernah berdiri sendiri (parsial), melainkan ditunjang oleh unsur-unsur lainnya di mana unsur yang satu dengan yang lain saling terkait dan terintegrasi secara fungsional. Misalnya, keris atau *kadutan* dalam kebudayaan Bali termasuk unsur peralatan yang berfungsi sebagai senjata sekaligus sebagai lambang kejantanan. Menurut pandangan budaya Bali, agar keris tersebut dapat berfungsi dengan baik, maka paling tidak harus ditunjang oleh beberapa unsur lainnya seperti unsur pengetahuan, kesenian, dan religi. Unsur pengetahuan yang dimaksud dalam konteks ini mencakup pengetahuan teknis tentang membuat, merawat, dan

menggunakan keris; Unsur kesenian mencakup keindahan ukiran atau ragam hias yang ada pada keris; Unsur religi mencakup mitos-mitos dan praktik-praktik ritual berkenaan dengan keberadaan keris yang dilandasi oleh konsepsi keyakinan masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, dalam sistem teknologi, misalnya, bisa saja dijumpai sejumlah unsur lain seperti kesenian, ekonomi, organisasi sosial, religi, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam sistem religi, bisa saja terdapat unsur-unsur lain seperti kesenian, teknologi, organisasi sosial, dan sebagainya.

Perkembangan aliran Fungsionalisme Kebudayaan melahirkan aliran Fungsionalisme Kebudayaan dalam bentuk baru yang lebih dikenal sebagai aliran Neo Fungsionalisme. Penganut aliran Neo Fungsionalisme berpandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki fungsi yang bersifat internal dan eksternal. Fungsi internal kebudayaan menyangkut manfaat-manfaat kebudayaan yang bersifat *manifest* atau disadari oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Sedangkan fungsi eksternal kebudayaan menyangkut manfaat-manfaat kebudayaan yang bersifat *latent* atau tidak disadari oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Oleh karenanya, fungsi *latent* ini disebut juga sebagai “fungsi tersembunyi”. Fungsi tersembunyi ini biasanya menyangkut logika rasionalitas yang tersembunyi di balik selubung budaya. Logika rasionalitas tersebut umumnya tidak disadari oleh “orang dalam” (masyarakat pendukung kebudayaan yang bersangkutan), namun disadari oleh “orang luar”, yakni hasil analisis para ilmuwan terhadap fungsi kebudayaan yang bersangkutan.

Misalnya, dalam berbagai kebudayaan kerap dijumpai kepercayaan tradisional berkenaan dengan hal-hal yang dianggap suci atau keramat, seperti kepercayaan terhadap jenis-jenis binatang, tumbuhan, hutan, sumber air, atau tempat-tempat tertentu yang dianggap suci atau keramat. Kepercayaan terhadap hal-hal yang dianggap suci atau keramat tersebut kerap pula dilegitimasi oleh mitos-mitos dan beraneka macam praktik ritual. Bagi “orang dalam”,

mitos dan praktik ritual tersebut dipandang sebagai suatu kewajiban yang sudah seharusnya mereka lakukan secara turun-temurun. Sebab, jika tidak, mereka percaya bahwa pada suatu saat akan muncul kekuatan-kekuatan gaib negatif yang dapat mengganggu atau mengancam kehidupan mereka.

Sebagai “orang luar” para penganut aliran Neo Fungsionalisme berpandangan bahwa di balik mitos dan praktik-praktik ritual yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap suci atau keramat tersebut sesungguhnya tersembunyi manfaat ekologis yang besar. Mitos dan berbagai macam praktik ritual tersebut merupakan mekanisme kontrol terhadap pengelolaan lingkungan yang cukup efektif. Jadi dengan adanya kepercayaan seperti dikemukakan di atas, manusia tidak dapat mengeksploitasi lingkungannya sekehendak hati, sehingga kelestarian ekologis akan tetap terjaga.

Salah satu contoh kongkrit mengenai hal tersebut dapat dijumpai dalam kepercayaan tentang hutan dan kera yang dianggap suci dan keramat di desa adat Sangeh. Sebagai “orang luar” seorang penganut aliran Neo Fungsionalisme dapat mengungkap manfaat-manfaat tersembunyi di balik kepercayaan tersebut. Diakui atau tidak, kepercayaan tersebut telah terbukti memberikan manfaat ekologis bahkan juga manfaat ekonomis bagi masyarakat setempat. Manfaat ekologis yang dimaksud adalah terjaganya kelestarian ekosistem hutan dan satwa keranya, sedangkan manfaat ekonomisnya berupa devisa yang diperoleh melalui pengelolaan kawasan hutan berikut satwa kera di dalamnya sebagai obyek wisata. Dengan mengacu pada cara berpikir aliran Neo Fungsionalisme di atas kita dapat melacak fungsi-fungsi tersembunyi di balik berbagai mitos dan tradisi ritual yang tersebar di berbagai kebudayaan di dunia.

9. Dinamika Kebudayaan

Pada hakikatnya kebudayaan bersifat dinamis, artinya setiap kebudayaan terus mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Dinamika kebudayaan dapat berupa perubahan kebudayaan ke arah kemajuan (*progress*) atau dapat pula berupa kemunduran (*regress*). Demikian pula skala perubahan kebudayaan dapat terjadi dalam skala yang besar dan dapat pula dalam skala kecil, dan dalam waktu yang cepat ataupun lambat. Namun demikian perubahan kebudayaan tidaklah berlangsung secara total (menyeluruh), melainkan terjadi pada aspek-aspek tertentu saja (parsial).

Secara garis besar fenomena perubahan kebudayaan disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal). Faktor internal dapat berupa penemuan-penemuan baru atau *invention* oleh individu atau kelompok di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penemuan-penemuan baru tersebut dapat berupa ide atau gagasan serta peralatan atau teknologi baru. Jika penemuan baru dapat diterima dan diterapkan oleh sebagian besar warga masyarakat, maka hal tersebut akan menimbulkan terjadinya dinamika kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan faktor eksternal dapat berupa diserapnya unsur-unsur kebudayaan luar (asing) ke dalam kebudayaan penerima melalui proses difusi kebudayaan, yakni persebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Misalnya diserapnya teknik bercocok tanam modern oleh masyarakat petani tradisional mengakibatkan perubahan pada beberapa aspek kehidupan petani, seperti berkurangnya solidaritas gotong-royong dan tolong-menolong di kalangan petani.

Menurut Ralph Linton (1984), dewasa ini hampir sembilan puluh persen perubahan kebudayaan masyarakat di dunia disebabkan oleh faktor eksternal. Hal tersebut di samping disebabkan oleh kian intensifnya komunikasi atau kontak antarbudaya, juga

karena proses penerimaan unsur luar jauh lebih mudah daripada proses penciptaan itu sendiri.

Penyerapan unsur-unsur kebudayaan asing tidaklah terbatas pada bidang teknologi saja, tetapi juga mencakup beberapa bidang lainnya seperti bahasa, ilmu pengetahuan, sistem ekonomi, organisasi sosial, bahkan juga religi. Dalam era globalisasi sekarang ini proses persebaran beraneka unsur kebudayaan dari berbagai bangsa ke berbagai tempat di dunia cenderung kian gencar. Fenomena ini tentunya membawa konsekwensi terhadap kian meningkatnya dinamika kebudayaan masyarakat di dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Masuknya unsur-unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan penerima disebabkan oleh proses kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan dapat terjadi melalui wahana perdagangan, penaklukan, pariwisata, dan sebagainya. Bagi masyarakat tertentu, seperti Bali, misalnya, sektor pariwisata telah lama menjadi primadona penghasil devisa handalan mengungguli sektor-sektor lainnya. Oleh karenanya tidaklah mengherankan jika berbagai bentuk promosi pariwisata kian gencar dilakukan guna menarik perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke daerah ini. Kedatangan wisatawan ke suatu daerah merupakan suatu fenomena kontak budaya dan kegiatan pariwisata pada dasarnya adalah proses perjumpaan kebudayaan antara kebudayaan wisatawan dengan kebudayaan penerima. Konsekwensi logis dari proses perjumpaan kebudayaan tersebut pada gilirannya menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan penerima. Contoh kongkrit mengenai hal tersebut, misalnya, dalam bidang bahasa, masyarakat lokal mulai menyerap unsur-unsur bahasa asing sehingga menggeser peran unsur-unsur bahasa lokal. dalam bidang kesenian, berbagai jenis kesenian asing seperti musik, film, dan mode Barat kian digemari dan dengan mudah diserap oleh masyarakat lokal sehingga menggeser atau paling tidak menyaingi peran kesenian lokal. Demikian pula

dengan gaya hidup, disadari atau tidak, tidak sedikit warga masyarakat lokal telah meniru gaya hidup wisatawan yang cenderung bebas dan individual. Akumulasi dari persoalan-persoalan tersebut tentunya dapat menimbulkan perubahan-perubahan pada kebudayaan lokal. Di samping itu, pariwisata juga dapat merangsang munculnya pergeseran fungsi kebudayaan lokal seperti sekularisasi dan komersialisasi kesenian sakral dan lain sebagainya.

Kasus Hawaii nampaknya dapat dijadikan pelajaran berharga bagi setiap masyarakat yang menitikberatkan pariwisata sebagai sektor penghasil devisa andalan. Perkembangan industri pariwisata Hawaii yang begitu pesat tidak saja membawa manfaat ekonomi yang besar, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial-budaya yang cukup parah. Kebudayaan pendatang pencari kerja dan wisatawan yang begitu dominan akhirnya menenggelamkan kebudayaan tuan rumah dan penduduk asli Hawaii akhirnya menjadi kaum minoritas dan merasa terasing dan terpinggirkan di negrinya sendiri.

Bercermin dari kasus Hawaii tersebut, kiranya konsep akulturasi dapat diacu sebagai strategi untuk mengantisipasi konsekwensi-konsekwensi negatif yang muncul dari proses perjumpaan kebudayaan. Akulturasi adalah suatu proses kebudayaan yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan penerima tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan penerima.

Implikasi dari pernyataan di atas adalah bahwa dalam proses akulturasi kebudayaan, khususnya dari perspektif kebudayaan penerima terdapat sekurang-kurangnya empat gejala :

- a. Adanya kreativitas dari pendukung kebudayaan penerima untuk mengolah unsur-unsur kebudayaan asing;

- b. Adanya usaha yang bersifat adaptif dalam membentuk suatu integrasi dan penyesuaian terhadap kebudayaan asing;
- c. Adanya upaya untuk melestarikan dan merevitalisasi kebudayaan sendiri.

Secara teoritik, berkaitan dengan proses akulturasi, terdapat sejumlah unsur kebudayaan asing yang mudah diterima oleh kebudayaan penerima dan di lain pihak juga terdapat sejumlah unsur kebudayaan asli (kebudayaan penerima) yang sukar digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan asing.

Unsur-unsur kebudayaan asing yang mudah diterima oleh kebudayaan penerima mencakup :

- (1) Unsur-unsur kebudayaan yang bersifat kongkrit (*principle of concretness*). Unsur-unsur ini meliputi unsur-unsur kebudayaan material terutama benda-benda atau alat-alat yang mudah ditiru pemakaiannya;
- (2) Unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai kegunaan yang besar (*principle of utility*)
- (3) Unsur-unsur kebudayaan yang mudah disesuaikan dengan kondisi masyarakat penerima (*principle of integration*).

Unsur-unsur kebudayaan asli (kebudayaan penerima) yang sulit digantikan oleh unsur-unsur kebudayaan asing mencakup :

- (1) Unsur-unsur kebudayaan yang sudah berfungsi secara meluas (*principle of function*);
- (2) Unsur-unsur kebudayaan yang sudah dipelajari sejak dini dalam proses sosialisasi individu-individu dalam masyarakat (*principle of early learning*);
- (3) Unsur-unsur kebudayaan yang berkaitan dengan agama atau religi (*principle of religion*)

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton. 2000. *Antropologi Metafisik*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Bakker, J.W.M. SJ. 1984. *Filsafat Kebudayaan Sebuah Pengantar*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Haviland, William A. 1988. *Antropologi*. Jilid 1. Edisi Keempat. (R.G. Soekadidjo, penerjemah). Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Koentjaraningrat, 1982. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.
- Koentjaraningrat, 1996. *Pengantar Ilmu Antropologi I.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. 1985. "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional", dalam Alfian (ed.) *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Lnton, Ralph. 1984. *Antropologi Suatu Penyelidikan tentang Manusia The Study of Man*. Bandung : Penerbit Jemmars.
- Peursen, C.A. Van. 1976. *Strategi Kebudayaan*. Diindonesiakan oleh Dick Hartoko. Jakarta : BPK Gunung Mulia, Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Snijders, Adelbert OFM Cap. 2004. *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius
- Suriasumantri, Jujun S. 2003. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Dengan Kata Pengantar Andi Hakim Nasution. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- *Wacana Antropologi Media Komunikasi antar Peminat dan Profesi Antropologi*, Vol.2, No.4, Januari – Februari 1999).